

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dipimpin oleh seorang presiden. Presiden berfungsi sebagai eksekutor terhadap seluruh kebijakan ekonomi, politik, kebudayaan dan pertahanan negara. Berjalannya suatu negara bergantung pada posisi ini (Alrasid dalam Sodikin, 2014). Maka dari itu, kursi presiden tidak pernah sepi diperebutkan karena posisinya yang sentral.

Pentingnya kedudukan presiden di Indonesia, maka berdasarkan amandemen UUD 1945, pengisian posisi ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan presiden di Indonesia merupakan bentuk penerapan nilai demokrasi dan sarana bagi masyarakat untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Segala hal yang terkait pemilihan presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu poin menjelaskan bahwa seorang presiden menjabat selama lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

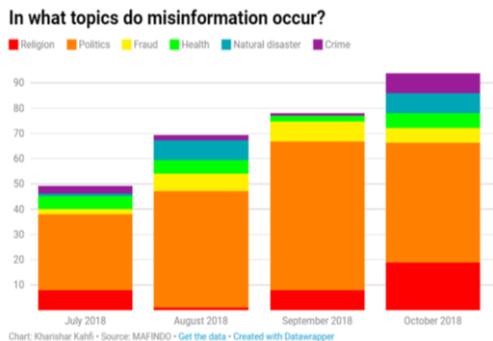
Tahun 2019 menjadi tahun pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden kembali hadir sebagai agenda rutin lima tahunan. Tahun ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengangkat tema “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”. Tema ini menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Keramaian pemilu terlihat dalam berbagai macam media seperti koran, baliho dan televisi yang mengabarkan hal-hal seputar visi dan misi pasangan calon, kekuatan tiap pasangan calon, debat antar calon presiden dan wakil presiden. Keramaian pemilihan presiden tidak hanya terjadi di media riil, tetapi juga dalam media virtual yang melibatkan para *netizen* (warganet). Warganet aktif untuk berbagi pandangannya terhadap masing-masing pasangan

calon atau salah satu pasangan calon dalam media virtual. Hal tersebut terlihat pasca debat perdana calon presiden dan wakil presiden. Kamis, 17 Januari 2019 terdapat 372.699 percakapan di Twitter, isu HAM muncul 10.589 kali, korupsi 9.903, dan isu hukum dengan angka 7.002 percakapan (CNN,18/01). Sebelumnya, tagar #DebatPilpres juga masuk ke dalam topik terpopuler dunia di Twitter pada pukul 21.00 WIB saat debat berlangsung (CNN, 18/01).

Media sosial menjadi salah satu alat pasangan calon melakukan kampanye selama proses pemilihan presiden, sehingga dalam proses kampanye virtual juga terbentuk pendukung virtual para paslon. Berbagai jenis tagar bermunculan di media sosial, bersifat mendukung atau kontra terhadap masing-masing pasangan calon, seperti beberapa tagar yang bermunculan #DebatPintarJokowi muncul menjadi trending topik sekitar 131.000 cuitan dalam satu jam, #PrabowoMenangDebat dengan 41.100 cuitan, #DaulatPanganEnergi02 dengan 17.300 cuitan, #PrabowoSmartLeader (Tempo, 17/02).

Aktivitas di media sosial tidak hanya bersifat kampanye namun berita-berita bohong juga kerap kali ditemukan. Hal ini dijelaskan oleh data berikut:



Gambar 1.1.

Grafik persebaran topik yang dikabarkan salah diambil dari *The Indonesian Anti Slander Society* (Mafindo) dalam *The Jakarta Post*, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa seringkali informasi dalam politik muncul sebagai informasi yang tidak tepat. Hal ini didukung oleh data dari *The Indonesian Anti Slander Society* (Mafindo) yang menjelaskan bahwa selama Juli sampai September *hoax* yang muncul di media sosial 58,7% berkaitan dengan isu politik (Tempo, 16/10). Ketidaktepatan berita politik dalam masa pemilihan presiden ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik antar kubu pasangan calon maupun antar masyarakat. Melalui wawancara awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa informan M merasa maraknya kasus *hoax* menyebabkan permusuhan dan menimbulkan jarak dengan teman di dunia maya maupun di lingkungan.

“ya akhirnya, orang yang kena berita hoax ya jadi teman ya jadi musuh, ada gap gitu, nyindir-nyindir, terjadi gap, gesekan-gesekan di dunia maya maupun di lingkungan”

Menurut informan M, berita *hoax* sebaiknya tidak ada di negara ini karena pengaruhnya dapat menghancurkan negara Indonesia.

“kalau berita hoax itu yo memang harus, kalau bisa ya nggak ada lah di negara kita ya, karena itu juga menjadi musuh lho, bahaya lho itu bisa hancur lho negara kalau gara-gara berita hoax itu”

Arie Sujito, Sosiolog Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa *hoax* dan ungkapan kebencian terbukti dapat menyebabkan konflik dan krisis kepercayaan diri pada kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang. Kemarahan dan konflik sosial muncul karena adanya *hoax* (Tempo, 15/3).

Walgito (2007) menjelaskan konflik adalah situasi dimana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih tidak setuju terhadap hal-hal atau situasi-situasi yang berkaitan dengan keadaan. Konflik akan muncul jika terjadi aktivitas yang tidak memiliki kecocokan. Menurut Myers (2012) kompetisi kalah-menang akan menimbulkan konflik dan citra negatif dari orang di luar kelompok. Permusuhan

akan muncul ketika kelompok-kelompok bersaing untuk suatu hal yang langka dan salah satunya adalah kursi presiden Indonesia. Konflik yang muncul akibat proses kompetisi jika ditambah dengan *hoax* akan menyebabkan konflik yang lebih kuat. Konflik yang terjadi dalam media virtual juga dapat berdampak pada dunia riil jika terus berlanjut.

Bentuk *hoax* yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu seperti ‘Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos’, ‘Truk Surat Suara Beraksara China’ dan yang terbaru ‘Server KPU di Singapura di *Setting* untuk Kemengangan Salah Satu Kubu’ telah terdeteksi di media sosial sejak Rabu, 3 April 2019 pukul 19.30 WIB dan menyebar luas hingga menjangkau 974 ribu *views* dalam waktu kurang dari 24 jam (Mafindo, 5/4). Tidak hanya *hoax*, konten provokasi dan ujaran kebencian juga tersebar menjelang Pemilu dan Pilpres 2019. Ferdinandus Setu selaku Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa ada sekitar 6.000 dalam kurun waktu dua bulan di seluruh *platform Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp Group* konten yang dianggap memprovokasi atau menyebarkan kebencian (BBC, 26/11). Ujaran kebencian dan memprovokasi tidak hanya berhenti di media sosial, hal ini dapat berdampak pada dunia riil. Rabu, 21 November 2018 lalu ditemukan Subaidi, warga Sampang, Jawa Timur tak bernyawa karena percekocokan urusan dukungan calon presiden di media sosial *Facebook*. Subaidi mengunggah foto dengan status “Siapa pendukung capres ini akan merasakan pedang ini”, akhirnya cekcok berlanjut di dunia riil dan berujung pada kematian (Tempo, 27/11).

Konflik yang terjadi termasuk dalam konflik antar-kelompok, terjadi antara kelompok pendukung pasangan calon nomor 01 dan kelompok pendukung pasangan calon nomor 02. Bentuk konflik yang marak terjadi berupa berita bohong dan ujaran kebencian. Konflik terjadi secara horisontal, terjadi antar pendukung pasangan calon yang saling menyampaikan ujaran kebencian.

Situasi konflik di media sosial perlu dikaji karena konflik yang muncul dalam media virtual dapat berdampak pada kesehatan mental masyarakat, bahkan kekerasan fisik. Masyarakat secara psikologis akan berpotensi mengalami ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dalam struktur mental serta emosionalnya dan terhambat menuju keadaan sehat mental. Notoesdirdjo dan Latipun (2001) menjelaskan bahwa kesehatan mental adalah konsep yang ideal. Prinsip ini menegaskan bahwa kesehatan mental menjadi tujuan utama bagi seseorang. Kesehatan mental bersifat kontinum, individu berusaha terus untuk mencapai kondisi yang paling sehat.

Fitriah (2014) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan individu mengalami gangguan mental yaitu persepsi, kognisi sosial, atribusi, komunikasi dan konflik. Faktor sosial yang dapat menghambat kesehatan mental adalah konflik dalam hubungan sosial (Ilfeld, 1977 dalam Notoesdirdjo & Latipun, 2001). Jika konflik tidak diselesaikan maka kondisi kesehatan mental di tataran makro akan semakin mengkhawatirkan.

Scheiders (1964 dalam Notoesdirdjo & Latipun, 2001) menjelaskan terdapat lima belas prinsip yang berguna dalam upaya meningkatkan kesehatan mental, dari lima belas prinsip tersebut salah satunya menyebutkan bahwa kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan belajar mengatasi secara efektif dan secara sehat terhadap konflik mental, kegagalan dan ketegangan yang ditimbulkan. Program-program promosi kesehatan mental salah satunya adalah meningkatkan keterampilan hubungan interpersonal yang bersifat khusus seperti asertif, komunikasi, pemecahan terhadap konflik dan pemecahan masalah (Notoesdirdjo & Latipun, 2001).

Menyadari dampak situasi konflik di media sosial terhadap kesehatan mental, resolusi konflik hadir sebagai sebuah alternatif pemecah. Resolusi konflik dijelaskan sebagai perilaku yang digunakan seseorang dalam menghadapi konflik. Resolusi konflik dipilih karena resolusi konflik tidak hanya menangani sebab-sebab konflik, tetapi juga berusaha membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang berkonflik.

Resolusi konflik juga harus dilakukan karena mengandung dua elemen penting yaitu manajemen konflik dan negosiasi. Kedua elemen tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berdamai dengan sikap negatif dan emosi negatif dalam situasi konflikual juga memahami adanya perbedaan. Hal tersebut akan membantu masyarakat kembali pada keadaan seimbang atau *equilibrium*. Menurut Kurdek (1994) terdapat empat gaya resolusi konflik, yaitu pemecahan masalah secara positif, keterlibatan dalam konflik, menghindar, dan mengalah.

Fenomena *netizen* dalam perhelatan pemilu dikaji oleh Firmansyah, Karlinah, & Sumartias (2017) dalam jurnal “Kampanye Pilpres 2014 dalam Konstruksi Akun *Twitter* Pendukung Capres”. Pada penelitian dilakukan identifikasi bagaimana dua calon presiden dikonstruksi melalui kicauan akun *Twitter* oleh para pendukung masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabowo dibangun oleh akun pendukung *Twitter* sebagai sosok yang sangat cerdas, tegas, kuat. Jokowi dibangun oleh pendukungnya sebagai tokoh populis, sederhana, jujur. Hal ini menjelaskan bahwa media virtual memiliki peran penting dalam membentuk citra kandidat presiden juga sebagai alat kampanye dari para kandidat.

Maraknya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik tidak hanya menyajikan informasi yang positif, *hoax* atau berita bohong juga banyak ditemukan. Hal ini dikaji oleh Legionosuko & Harnowo (2017) dalam jurnal “Dinamika *Fake News* atau *Hoax* sebagai Sumber Konflik Horisontal pada Pilkada Propinsi DKI Tahun 2017” menunjukkan bahwa jejaring sosial dan media sosial dalam proses Pilkada DKI 2017 sering disalah gunakan dengan bentuk kabar bohong atau *hoax*, hal ini berpotensi besar dalam terciptanya konflik-konflik yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. *Hoax* juga menimbulkan gejolak sosial dan bentrok horisontal. Dinamika *netizen* dalam pemilihan presiden juga dikaji oleh Madrah dan Mubarak (2018) dalam jurnal “*Netizen* dalam Kampanye Pilpres RI 2014” yang menunjukkan bahwa era siber saat ini memberikan ruang bagi

praktik demokrasi, namun juga menghasilkan dampak negatif. Hal positif yang muncul adalah kesempatan tak terbatas *netizen* untuk mengekspresikan gagasannya dengan bebas. Namun, terdapat hal negatif yang muncul yaitu berbagai bentuk propaganda dan praktik kampanye hitam yang kontra dengan nilai demokrasi.

Maka dari itu resolusi konflik dibutuhkan sebagai upaya pemecahan terhadap konflik demi tercapainya kesehatan mental masyarakat Indonesia. Resolusi konflik tidak hanya menangani sebab-sebab konflik tetapi juga berusaha membangun hubungan baru antara kelompok-kelompok yang sedang berkonflik dan dilakukan setelah adanya konflik. Munculnya konflik dalam perhelatan pemilihan presiden 2019 menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui dinamika resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019 demi terwujudnya kesehatan mental masyarakat Indonesia.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ingin mengetahui dinamika resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019. Resolusi konflik dijelaskan sebagai usaha menangani sebab-sebab konflik juga berusaha membangun hubungan baru antara kelompok-kelompok yang sedang berkonflik. Informan penelitian ini adalah *netizen*. Fokus penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, bagaimana dinamika resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika resolusi konflik *netizen* pada pemilihan presiden 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi teori psikologi klinis makro dan psikologi sosial mengenai dinamika

resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019 demi terwujudnya kesehatan mental masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

a. Informan

Informan mendapat gambaran mengenai bagaimana dinamika resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019 dan menjadi referensi pendidikan politik melakukan resolusi konflik.

b. Peneliti

Peneliti dapat mengetahui gambaran dinamika resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019 dan memberikan informasi mengenai pemikiran, sikap, perilaku dan keadaan lingkungan *netizen* dalam upaya resolusi konflik pada pemilihan presiden 2019.

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan mendapat gambaran mengenai dinamika resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019 sehingga studi mengenai resolusi konflik di bidang psikologi dapat dikembangkan sebagai upaya tercapainya kesehatan mental masyarakat.

d. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kemenkominfo sebagai pembuat kebijakan terkait resolusi konflik *netizen* pada pemilihan presiden 2019 sehingga dapat mendukung upaya resolusi konflik dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan.

e. Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dalam memberikan gambaran bagaimana dinamika resolusi konflik pada *netizen* saat pemilihan presiden 2019 dan menjadi referensi pendidikan politik untuk melakukan resolusi konflik.